BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan sesuai dengan uraian pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dari segi hirarki perundangan, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman tugas Kepala Daerah dalam kerukunan umat beragama, peran Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah, bila dikaitkan dengan jenis dan hirarki Peraturan perundang-undangan Surat Keputusan atau Peraturan Menteri biasanya tidak mengikat diluar institusi yang ada di bawah lingkup kewenangan kementerian tersebut. Di samping itu berdasarkan jenis dan hirarki peraturan perundangan yang berlaku tidak ditemukan Peraturan atau Surat Keputusan Menteri dalam hirarki perundangan yang ada. Berdasarkan berbagai pasal dalam PERBER ini dapat dipahami bahwa persoalan pendirian rumah ibadah memang menjadi dasar dari upaya pengaturan hukum untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Namun demikian tidak semesinya hal ini menghambat atau membelokkan maksud ditetapkannya kebijakan perizinan pendirian rumah ibadat, karena bagaimanapun prinsipnya hal itu dilakukan justru utamanya untuk melindungi HAM, khususnya kebebasan beragama.
2. Kinerja dalam penerapan atau implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mulai dari

diberlakukan sampai saat ini dilihat dari kinerja pemerintah Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama masih belum optimal dan merata. Respons Pemerintah Daerah terhadap PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memang cukup baik terlihat dari jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama di pangkalan data yang lebih dari separuhnya dan jumlah Peraturan Gubernur terkait Forum Kerukunan Umat Beragama yang kini sudah ada di hampir semua daerah. Tetapi, substansi peraturan lokal masih kurang jelas dan tidak menyebutkan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Ini membuat dukungan kepada upaya pemeliharaan kerukunan sangat bergantung pada preferensi pribadi Kepala Daerah atau kedekatan personal Kepala Daerah dengan FKUB. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota juga kerap membuat ketegangan konflik pendirian rumah ibadat meningkat dan sulit diselesaikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada poin pertama dan kedua maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia sebaiknya, Mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama. Implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang dirasakan kurang efektif, memerlukan peningkatan status hukumnya menjadi Undang-Undang. RUU Perlindungan Umat Beragama yang

tengah digulirkan pemerintah diharapkan menjawab problematika yang berkembang saat ini. Dimana kini masih terdapat diskriminasi dan minimnya perlindungan terhadap minoritas. RUU diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mencegah dan menindak dengan tegas konflik yang berlatar belakang agama.

2. Untuk Pemerintah Daerah harusnya ada upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan perwujudan kerukunan umat beragama di Indonesia, antara lain, yaitu dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, ada pula upaya yang justru ingin menambah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama yang bersumber dari tingkah laku atau pola perilaku masyarakat dalam pengelolaannya tidak sepenuhnya dapat menggunakan pendekatan peraturan atau legalistis. Bahwa dibutuhkan peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan kerukunan umat beragama.